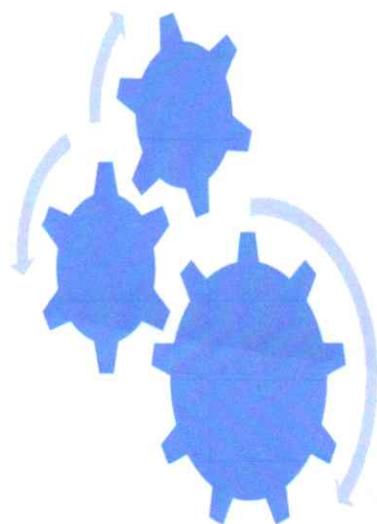




# **RANWAL RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2025**



## Kata Pengantar

Puji dan Syukur Kita Penjatkan Kehadirat Allah, SWT, karena hanya atas petunjuk-Nya sehingga Penyusunan Dokumen Ranwal Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 ini dapat dilaksanakan.

Ranwal Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun dan diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 sesuai tugas dan fungsi OPD, sehingga visi pembangunan yang telah ditetapkan akan dapat terwujud.

Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Kutai Timur tahun 2025, yang merupakan prioritas pembangunan pemerintah Daerah Kutai Timur tahun 2025 yang masuk dalam kelompok pembangunan infrastruktur dasar dan penciptaan daya saing daerah. Disamping itu peningkatan peran serta pengelolaan TI lingkup Pemerintah Kab. Kutai Timur dalam rangka Implementasi e-Government, Keterbukaan Informasi serta Penyelenggaraan Urusan Statistik dan Persandian. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan, Sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 mendatang.

Sangatta, Maret 2024



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii-iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1-1
1.2. Landasan Hukum .....	1-5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	1-7
1.4. Sistematika Penulisan .....	1-8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. KUTAI TIMUR</b> .....	<b>II-I</b>
2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..	II-10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..	II-26
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kab. Kutai Timur .....	II-28
2.6. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Kutai Timur .....	II-50
2.7. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Kutai Timur.....	II-53
2.8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-55
2.9. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat .....	II-56

<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. KUTAI TIMUR .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	III-57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informa- tika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur .....	III-58
3.3 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-61
<b>BAB IV RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>IV-67</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V-92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	<b>Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....</b>	<b>II-17</b>
<b>Tabel 2.2</b>	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan.....</b>	<b>II-17</b>
<b>Tabel 2.3</b>	<b>Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....</b>	<b>II-18</b>
<b>Tabel 2.4</b>	<b>Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK (P3K) pada Unit Kerja Berdasarkan</b>	<b>II-18</b>
<b>Tabel 2.5</b>	<b>Komposisi Non PNS ( TK2D) pada Unit Kerja berdasarkan Pendidikan.....</b>	<b>II-19</b>
<b>Tabel 2.6</b>	<b>Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Tahu 2024..</b>	<b>II-21</b>
<b>Tabel 2.7</b>	<b>Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2024 .....</b>	<b>II-24</b>
<b>Tabel 2.8</b>	<b>Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian s/d Tahun 2025 .....</b>	<b>II-29</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....</b>	<b>III-62</b>
<b>Tabel 4.1</b>	<b>Rencana Program,Kegiatan,Sub Kegiatan,Indikator Kinerja,dan pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Kutai Timur Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....</b>	<b>IV-67</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasional dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus Rencana kerja (Renja) Dinas Kominfo Staper Kabupaten Kutai Timur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.



Berdasarkan Permendagri No: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 138, bahwa perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang mana akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Secara hasil nyata penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi berperan dalam menunjang umat manusia dalam beraktivitas diberbagai sektor kehidupan sehingga tingkat kehidupan manusia saat ini juga sangat mengalami kemajuan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini membuat suatu perubahan tatanan kehidupan sehingga muncul suatu kesenjangan masyarakat. Terjadinya kesenjangan ini, disebabkan oleh



beberapa hal antara lain tingkat Pendidikan, budaya, kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Dalam rangka meminimalisir kesenjangan ini diperlukan peran negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasi melalui pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan Lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik diharapkan menjadi perwakilan pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka, diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi, dan informatika yang pada gilirannya menciptakan masyarakat yang produktif sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-Government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Timur.

e-Government yang dimaknai sebagai penyelenggara pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Implementasi e-Government di Kabupaten Kutai Timur ini sangat dibutuhkan mengingat wilayahnya yang begitu luas.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



beberapa hal antara lain tingkat Pendidikan, budaya, kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Dalam rangka meminimalisir kesenjangan ini diperlukan peran negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasi melalui pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan Lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik diharapkan menjadi perwakilan pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka, diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi, dan informatika yang pada gilirannya menciptakan masyarakat yang produktif sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-Government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Timur.

e-Government yang dimaknai sebagai penyelenggara pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Implementasi e-Government di Kabupaten Kutai Timur ini sangat dibutuhkan mengingat wilayahnya yang begitu luas.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian Publik;
3. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang penyelenggaraan e-Government;
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Persandian dan Statistik;

Oleh karena itu untuk mendukung optimalisasi peran kominfo dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat diperlukan manajemen tatakelola dan pemanfaatan Teknologi informasi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan yang mencakup semua OPD.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 – 2026. Kemudian untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra maka disusunlah dokumen perencanaan kerja ini untuk 1 (satu) tahun kedepan.

Penyusunan rancangan Rencana kerja OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur disusun berdasarkan isu strategis yang selalu dinamis dan mempertimbangkan permasalahan komunikasi dan informatika di Kabupaten kutai Timur, dimana Renja tersebut berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam 1 tahun kedepan.

Dokumen Renja memuat target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, telaah rancangan rencana kerja awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telaah usulan program dan Kegiatan Masyarakat, pokok pikiran/ aspirasi masyarakat, dan telaah kebijakan Nasional bidang Komunikasi dan Informasi. Untuk mencapai hal tersebut maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil hasilnya. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun



sebagai sebuah kebijakan merupakan instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kerana perencanaan yang baik dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar, disamping peranan tersebut, bidang Komunikasi dan Informatika, bagi suatu daerah memiliki peranan lainnya, yaitu sebagai “Promoting Sector” artinya Kominfo memiliki peran untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah sehingga potensi yang ada lebih produktif untuk dapat tumbuh dan berkembang, Kominfo, Sandi dan statistik berperan dalam menunjang distribusi informasi dalam meningkatkan aktifitas sosial ekonomi masyarakat. Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai “mediator” penerapan teknologi informasi untuk memperlancar pelayanan publik secara online. Dengan rencana kerja (renja) tersebut dapat dijadikan acuan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dapat bekerja berdasarkan target Renstra yang ada untuk dijadikan komitmen bersama.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RENJA Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005



- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;
  11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Bupati Kab.Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025.
2. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi, kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan, sesuai dengan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
2. Menjadi acuan bagi Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penyusunan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN.**

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang pengertian, fungsi dan latar belakang Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

Bab ini memuat Tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur diatur melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2023. Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan juga review terhadap rancangan awal RKPD.

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.**

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, dan juga program dan kegiatan.

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.**

Bab ini memuat kegiatan-kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur beserta dengan rencana pendanaannya.



## **BAB V. PENUTUP.**

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain: penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan.



## GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan ditanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur diatur melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2023.

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan dalam bab III, Di dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika persandian dan statistik.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Kutai Timur sebagai berikut:

#### A. Kepala Dinas

##### a. Tugas Pokok

Menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

##### b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;



2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik Publik;
3. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang penyelenggaraan *e-Government*;
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Persandian;
5. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Statistik;
6. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

## **B. Sekretaris**

### **a. Tugas Pokok**

Memberikan pelayanan Administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

### **b. Fungsi**

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
4. Pengelolaan urusan ASN.

## **B.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

### **a. Tugas**

Melakukan urusan yang meliputi: Persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Daerah.

### **b. Fungsi**

1. Penyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan dinas;



2. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
3. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
4. Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
6. Penatausahaan kepegawaian.

## **B.2. Sub Bagian Keuangan**

### **a. Tugas**

1. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
2. Penatausahaan; dan
3. Akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

### **b. Fungsi**

1. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
2. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan verifikasi keuangan; dan
4. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

## **C. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan**

### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan.

### **b. Fungsi**

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan;



2. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan ;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis seksi Pengelolaan Opini dan Media Komunikasi Publik;
4. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pelayanan Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik ;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Kemitraan Media Komunikasi Publik dan Kehumasan;
6. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan laporan masing-masing seksi dibawahnya;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya;
8. melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik; dan
9. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### **D. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian**

##### **a. Tugas**

Membantu kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.

##### **b. Fungsi**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;
2. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program bidang Teknologi Informasi Komunikasi;



3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan Data dan Integritas Sistem Informasi;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Pengelolaan Data dan Integritas Sistem Informasi dan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya

#### **E. Bidang Aplikasi Informatika**

##### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika.

##### **b. Fungsi**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Aplikasi Informatika;
2. Penyiapan bahan perumusan koordinasi perencanaan program bidang Aplikasi Informatika;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan Domain dan aplikasi;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Pengelolaan *e-Government*;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi;



6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Domain dan aplikasi, Pengelolaan *e-Government* dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **F. Bidang Statistik**

##### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian teknis bidang Statistik.

##### **b. Fungsi**

1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### **G. Unit Pelaksanaan Tugas Daerah**

Melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

#### **H. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana**

1. Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



3. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan Pembangunan;
4. Jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan beban kerja;
5. Jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Jabatan Fungsional merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh ASN yang mempunyai syarat dan ketentuan Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina masing-masing;
7. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur didukung oleh 94 orang

Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan di bidang komunikasi, informatika, serta bidang persandian dan statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur memiliki SDM jumlah sebanyak 42 orang PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K) 8 Orang dan tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) 44 Orang terdiri dari :



**Tabel.2.1**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

NO.	Eselon	Jumlah Formasi	Tingkat Pendidikan					Jumlah (Orang)
			S3	S2	S1	DIPLOMA	SLTA	
1	II	1	-	1	-	-	-	1
2	III	2	-	4	-	-	-	4
3	IV	2	-	1	2	-	-	3
4	Fungsional / P3K dan Pelaksana	42	-	1	33	4	4	42
	<b>Jumlah</b>							<b>50</b>

**Tabel. 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No.	Unit Kerja	Pangkat dan Golongan												Jumlah (Orang)
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Sekretariat	-	2	-	-	-	6	4	2	-	-	1	-	15
2	Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Humas	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	6
3	Bidang Infrastruktur TI Komunikasi dan Persandian	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	6
4	Bidang Aplikasi Informatika	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	4
5	Bidang Statistik	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3
6	UPT	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3
7	Jab Fungsional dan Jab. Pelaksana	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	5
8	PPPK (P3K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>50</b>



**Tabel. 2.3**  
**Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Eselon	Jumlah Formasi	Tingkat Pendidikan						Jumlah (Orang)
		S3	S2	S1	DIPLOMA	SLTA	SLTP	
II	1		1	-	-	-	-	1
III	4		4		-	-	-	4
IV	3		1	2	-	-	-	3
Fungsional & Pelaksana	34		1	28	2	3	-	34
PPPK (P3K)	8	-	-	6	2	-	-	8
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>		<b>7</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>50</b>

**Tabel. 2.4**  
**Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK (P3K)**  
**pada Unit Kerja Berdasarkan Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	DIPLOMA	SLTA	
1	Sekretariat	2	10	2	1	15
2	Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan	1	9	-	-	10
3	Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian	2	4	1	-	7
4	Bidang Aplikasi Informatika	1	6	-	-	7
5	Bidang Statistik	-	5	-	2	7
6	UPT RPD	1	2	-	1	4
	<b>Jumlah</b>			-	-	<b>50</b>



**Tabel 2.5**  
**Komposisi Non PNS (TK2D ) pada Unit Kerja berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan (Bidang Studi)	Jumlah
<b>I. Sekretariat</b>		
1.	S1 – Pertanian	1 orang
2.	S1 – Ekonomi`	1 orang
3.	S1 – Manajemen	3 orang
4.	S1 – Ilmu Komunikasi	1 orang
5.	S1 – Pendidikan Geografi	1 orang
6.	S1 – Teknologi Pendidikan	1 orang
7.	S1 – Pendidikan Teknik Bangunan	1 orang
8.	S1 – Ilmu Pemerintahan	1 orang
9.	SMK– Administrasi Perkantoran	1 orang
10.	SMK – Teknik Informatika	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>12 orang</b>
<b>II. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</b>		
1.	S1 - Administrasi Niaga	1 orang
2.	S1 – Akuntansi	1 orang
3.	S1 - Kelautan	1 orang
4.	S1 - Ekonomi	1 orang
5.	S1 - Pendidikan Agama Islam	1 orang
6.	S1 – Agroteknologi	1 orang
7.	S1– Teknik Mesin	1 orang



8.	S1– Teknik Perminyakan	1 orang
9.	S1– Manajemen	2 orang
10.	SMA – IPA	1 orang
11.	SMK–Teknik Komputer Jaringan	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>12 orang</b>
<b>III. Bidang Infrastruktur TI dan Persandiaan</b>		
1.	S1 – Kelautan	1 orang
2.	S1 – Psikologi	1 orang
3.	S1 – Teknik Elektro Telekomunikasi	1 orang
4.	SMK – Keperawatan	1 orang
5.	SMK - Akuntansi	1 orang
6.	SMA – IPA	1 orang
7.	SMA – IPS	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>7 orang</b>
<b>IV. Bidang Statistik</b>		
1.	S1 - Pendidikan Agama Islam	1 orang
2.	S1 - Pendidikan Biologi	1 orang
3.	S1 - Manajemen	1 orang
4.	SMK - Mekanik Otomotif	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>4 orang</b>
<b>V. Bidang Aplikasi dan Informatika</b>		
1.	S1 - Manajemen	1 orang
2.	S1 - Hukum	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>2 Orang</b>
<b>V. Kepala UPT Radio Pemerintah Daerah (RPD)</b>		
1.	S1 - Manajemen	2 orang
2.	S1 – Ilmu Komunikasi	1 orang



3.	S1 – Pendidikan Agama Islam	1 orang
4.	S1 – Peternakan	1 orang
5.	Paket C – IPS	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>7 orang</b>

Selain SDM, sumber daya lain yang dapat memberi nilai tambah adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur, baik karena perubahan OPD, Mutasi OPD maupun karena belanja modal berupa:

**Tabel 2.6**  
**Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Tahun 2024**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi				Keterangan
		Lengkap	Kurang	Cukup	Tidak Ada	
1	AC		√			16 Unit
2	'Access Point		√		√	5 Unit
3	Lemari Besi Sliding	√				11 Unit
4	Lemari Kayu (Arsip)		√			1 Unit
5	Lemari set			√		2 Unit
6	Baterai 100 ah (baterai untuk BTS)			√		12 Buah
7	Brand Kas	√				1 Unit
8	Handycam	√				2 Unit
9	Drone	√				1 Unit
10	HT	√				3 Unit
11	Kamera	√				3 Unit
12	P.C Unit	√				11 Unit
13	Laptop		√			6 Unit, 2



						Kurang Bagus
14	LED TV		√			1 Unit
15	Kursi Kerja		√			10 Buah
16	Meja Kursi Kerja (MOUBILER LAINNYA)		√			1 Buah
17	Printer		√			19 Unit, 2 kuarang bagus
18	Pengadaan Alat Pembersih (Vacum Cleaner)				√	1 Unit, rusak
19	Perangkat Video Conference dan Peralatan Lainnya	√				1 Unit
20	Rak Besi		√			1 Unit
21	Recorder			√		5 Unit
22	Scanner			√		3 Unit
23	Router		√			2 Unit
	Rumah Genset		√			1 Buah
25	Server			√		1 Unit
26	Wireless TOA		√			1 Unit
27	Unintemptible Power Supply (UPS)		√			3 Unit, 1 Rusak
28	Switch manageable					2 Unit
29	Tangga Alumunium				√	1 Buah, rusak
30	Toolkit Cat 6		√			2 Unit
31	Sepeda Motor		√			1 Unit



### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur merupakan nomenklatur baru yang terbentuk Peraturan Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Kutai Timur.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur, selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 juga pada Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik yang tertuang pada Permen Kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan

Indikator Kunci (PP 6/2008). Selain itu, kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.7

**Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2023 (n-1)	2024 (n)	2024 (n)	2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Layanan Komunikasi	%	-	-	80.48	83.17	85.48	80.48	-	83.17	85.48	
2	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	%	-	-	34.29	48.57	62.86	35	-	48.57	62.86	
3	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	



**Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian :**

**1. Data Perangkat daerah yang terkoneksi jaringan Fiber Optik**

No.	Keterangan	Satuan	Tahun				Total
			2019	2020	2021	2023	
1	Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan Fiber Optik	Jumlah	-	6		13	

**Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan**

**1. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**

Pada tahun 2020 telah dibentuk 3 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Dengan adanya KIM ini diharapkan akan menjadi media penyampaian Informasi dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat yang sifatnya G to C (Government to Citizen). sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Disamping itu persoalan yang ada di Masyarakat dapat ditangkap langsung oleh pemerintah dan selanjutnya dengan cepat dicarikan solusi dari persoalan tersebut.

**2. Implementasi Keterbukaan informasi Publik**

Dalam rangka melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi publik dilingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah diterbentuk 1 PPID Utama dan 57 PPID Pembantu. PPID Pembantu yaitu PPID yang berada diseluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkup Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 39 OPD dan 18 PPID Pembantu di Kecamatan. Pada tahun 2020 terdapat 10 OPD yang telah menyampaikan Informasi Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung good governance dan open governance di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur.



## **Bidang Statistik**

### **- Penerapan Satu data**

Dalam rangka implementasi Satu Data, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018 telah menyediakan Portal satu data dengan Sistem Informasi Statistik daerah (SISD) yang berisi data dasar pembangunan daerah Kab. Kutai Timur. Pada Tahun 2019 dilakukan pengembangan sistem menjadi Portal Satu data Kutai Timur dengan alamat situs [www.data.kutaitimurkab.go.id](http://www.data.kutaitimurkab.go.id). Pengembangan SISD menjadi portal satu data adalah dengan menambahkan unsur data sectoral dan integrasi manajemen data dengan menggunakan alat bantu Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) yang terintegrasi dengan portal data nasional. Portal data Kutai Timur ini diharapkan akan menjadi E-database serta dapat menyajikan data dan informasi secara terbuka, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

### **1. Penyelenggaraan urusan persandian untuk pengamanan informasi**

Kegiatan yang telah dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur berkaitan penyelenggaraan urusan persandian adalah koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah. Selain itu telah dibuat kebijakan berupa peraturan bupati tentang penerapan tanda tangan elektronik.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

#### **2.4.1 Analisis Internal dan Eksternal**

Identifikasi factor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, dilakukan untuk mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **A. Faktor Internal**

##### **1. Kekuatan:**

- 2.4.2 Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.**



- 2.4.3 Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cukup memadai hal ini dapat dilihat dari komposisi golongan, pangkat, jabatan fungsional dan
  - 2.4.4 eselonisasi jabatan serta latar belakang pendidikan, sehingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat akan bisa dicapai.
  - 2.4.5 Adanya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkan
  - 2.4.6 Adanya kepemimpinan Kepala daerah yang memiliki integritas, kapabilitas, akseptabilitas dan mobilitas yang tinggi, memungkinkan aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomodasi, juga memiliki kemampuan membangun Partner Aliansi Strategic dengan berbagai lembaga pemerintahan seperti legislatif, yudikatif dan alim ulama serta ormas, orsospol.
  - 2.4.7 Pemerintah daerah telah memiliki jaringan Fiber Optik mandiri, fasilitas data center (NOC) dan sarana prasarana penunjang lainnya.
2. Kelemahan :
3. Kurangnya kegiatan peningkatan kompetensi Aparatur pemerintah
  4. Regulasi/ peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika, pos dan telekomunikasi.
  5. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal.
  6. Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di OPD
  7. Data yang ada masih kurang lengkap

## B. Faktor Eksternal

## C. Tantangan

1. Wilayah Kab. Kutai Timur yang luas menjadi tantangan dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi secara merata dan proporsional dalam rangka mewujudkan Kutai Timur merdeka signal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan ekonomi bagi masyarakat.



2. Pengelolaan Website Pemerintah Kutai Timur secara menyeluruh
3. Konektivitas antar OPD
4. Jaminan keamanan sistem informasi
5. Kesenjangan kemampuan teknologi informasi di masyarakat
6. Penyediaan dan penyebaran informasi publik
7. Penyediaan data yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan pembanguna

#### D. Peluang

1. Meningkatnya sarana dan prasarana di masyarakat.
2. Dukungan layanan digital akan memicu muningkatnya Ekonomi Masyarakat
3. Meningkatnya bandwith yang ada, serta terpfokusnya pengelolaan bandwidth di Dinas Kominfo sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4. Meningkatnya jumlah pelayanan publik yang diselenggarakan secara online
5. Meningkatnya tata kelola wilayah dan daya saing daerah melalui implementasi smart city
6. Penyelenggaraan Statistik sektoral
7. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi

#### E. Ancaman

1. Perubahan kebijakan pemerintah pusat melalui regulasi yang berdampak pada dinamika pembangunan di Kutai Timur
2. Timbulnya permasalahan sosial yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pelayanan dasar, menurunnya stabilitas keaman dan lambatnya transporansi pelayanan publik
3. Keamanan sitem informasi yang dikelola pemerintah.
4. Kebebasan dalam penggunaan media sosial

#### 2.4.8 Faktor Kunci Keberhasilan:

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang diidentifikasi berdasarkan factor internal dan eksterna adalah:

- a. Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik.



- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.
- d. Pemanfaatan TIK untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.
- e. Tersedianya data yang akurat dan update untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar semua stakeholder dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

## **2.5 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Kutai Timur.**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya hasil evaluasi ini, PD dapat mengoptimalkan capaian target kinerja yang telah ditentukan.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Reviu didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.



Tabel 2.8

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian s/d Tahun 2025

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100 %	-	-	-	100	100 %	100 %	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja PD	4 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100

BAB II  
 GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	3 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	-	60 Orang	56 Orang	100	70 Orang	60 Orang	100

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersediannya Gaji TK2D	60 Orang	-	-	-	-	60 Orang	60 Orang	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	100	14 Orang	14 Orang	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersediannya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Buah	-	-	-	-	12 Buah	10 Buah	100

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat	35 %	-	-	-	-	70 %	50 %	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapan yang disediakan	115 Stel	-	120 Orang	120 Orang	100	1 Paket	1 Paket	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	20 orang/diklat	-	-	-	-	50 orang/diklat	50 orang/diklat	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pengelolaan Adminitrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan kantor yang memadai	7 Paket	3 Buah	35 Jenis dan 30 Buah	35 Jenis dan 30 Buah	100	7 Paket	4 Paket	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	-	20 Item	11 Item	100	6 Paket	1 Paket	100

BAB II  
 GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	1 Paket	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	1 Paket	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	15 Kali	10 Kali dan 15 Kali dan 1 Dokumen	10 Kali dan 15 Kali dan 1 Dokumen	100	50 Kali	12 Laporan	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan SKPD	-	-	-	-	-	-	0 %	100

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	-	1 Unit	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya /tercukupinya kebutuhan akan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Laporan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	12 Laporan	12 Laporan	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	100

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpilihnya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	7 Unit	11 Unit	7 Unit	98	14 Unit	14 Unit	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	14 Unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	3 Pekerjaan	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Cakupan Layanan Telekomunikasi</b>	77.37 %	-	-	-	-	77.37 %	87,94 %	100

BAB II  
 GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kutai Timur	77.37 %	-	-	-	-	77.37%	87,94 %	100
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pemantauan Isu Publik dan Layanan Aduan Masyarakat	Massyarakat Kutai Timur	-	-	-	-	Massyarakat Kutai Timur	1 Unit	100
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Media Komunikasi Milik Daerah, Penyebaran Informasi Publik Melalui Media , Evaluasi Penggunaan Media Komunikasi Publik	5 Jenis Sarana media komunikasi,750 Tayang,1 Dokumen	-	5 Jenis Sarana media komunikasi,750 Tayang,1 Dokumen	5 Jenis Sarana media komunikasi,750 Tayang,1 Dokumen	100	5 Jenis Sarana media komunikasi,750 Tayang,1 Dokumen	1 Dokumen	100

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Pelayanan Informasi Publik	Pelaksanaan Fungsi PPID, elektronik Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	57 OPD	-	57 OPD	57 OPD	100	57 OPD	1 Dokumen	100
Layanan Hubungan Media	Pengelolaan Hubungan Media dan Penyebaran Informasi melalui Media Masyarakat	300 Kali terbit	-	300 Kali terbit	300 Kali terbit	100	300 Kali terbit	1 Dokumen	100
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dikelola Pengembangan dan Pemberdayaan	5 KIM	3 KIM	5 KIM	5 KIM	100	5 KIM	1 Dokumen	100
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	40 orang	100
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Sarana dan Prasaranapendukung Informasi dan komunikasi publik	5 OPD,1 Billboard,1 unit layanancall center	-	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 Unit	100

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik, Cakupan Layanan Telekomunikasi, Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk Pelayanan Publik	25.71%	-	25.71%	67,50 %	100	25.71%	67,50 %	100
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan nama domain dan system jaringan dilingkungan Pemerintah Daerah Kutai Timur	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersediannya Koneksi antar OPD melalui Fiber Optik ( FO)	3 OPD	-	3 OPD	3 OPD	100	3 OPD	5 OPD	100
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Implementasi E-Government, SPBE dan Smart City	77 Titik	-	77 Titik	77 Titik	100	77 Titik	97 Titik	100

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintahan	13 OPD (300 Mbps)	-	13 OPD (300 Mbps)	13 OPD (300 Mbps)	100	13 OPD (300 Mbps)	28 Unit	100
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	1 Dokumen	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya koordinasi sistem keamanan informasi	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	2 Dokumen	100
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Jumlah layanan Publik yang terintegrasi - Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online	2 aplikasi 3 layanan publik	-	2 aplikasi 3 layanan publik	2 aplikasi 3 layanan publik	100	2 aplikasi 3 layanan publik	7 unit	100

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan masterplan Smart City	3 OPD	-	3 OPD	3 OPD	100	3 OPD	3 Dokumen	100
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan sitem penghubung layanan Pemerintah Daerah		-	--		-	159 Layanan	159 Layanan	100
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 kali 1 dokumen	-	2 kali 1 dokumen	2 kali 1 dokumen	100	2 kali 1 dokumen	5 Dokumen	100

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi</b>	Ada	-	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Menyediakan data Statistik Sektoral	40%	-	40%	40%	100	40%	40%	100

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100%	-	-	-	-	80%	3 Dokumen	100
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah OPD yang terintegrasi dalam portal satu data Jumlah peserta diklat/bimtek peningkatan SDM Statistik	8 OPD 50 org	-	8 OPD 50 org	8 OPD 50 org	100	8 OPD 50 org	8 OPD 50 org	100
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Buah	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan portal satu data Setiap Tahun	1 Web	-	1 Web	1 Web	100	1 Web	1 Web	100
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	6 kali	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	1 Dokumen	100

BAB II  
 GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



<b>PROGRAM</b> <b>PENYELENGGARAAN</b> <b>PERSANDIAN UNTUK</b> <b>PENGAMANAN</b> <b>INFORMASI</b>	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ada	-	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100
<b>Penyelenggaraan</b> <b>Persandian untuk</b> <b>Pengamanan Informasi</b> <b>Pemerintah Daerah</b>	Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Jaringan Komunikasi Sandi	80%	-	25%	25%	100	60%	45%	100
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	-	-	-	-	1 laporan	1 Laporan	100

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Layanan	-	-	-	-	-	3 laporan	100
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Paket	-	-	-	-	-	6 Perangkat Daerah	100

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



<p>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Terbentuknya Pola Jaringan Komunikasi sandi antar Perangkat Daerah</p>								
<p>Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi</p>	<p>6 OPD dan 6 Orang</p>	<p>--</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>6 PD</p>	<p>6 PD</p>	<p>100</p>	
<p><b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b></p>	<p>Cakupan Layanan Telekomunikasi</p>	<p>77.37%</p>	<p>-</p>	<p>77.37%</p>	<p>87,94%</p>	<p>100</p>	<p>77.37%</p>	<p>87,94%</p>	<p>100</p>

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO STAPER KAB. KUTIM



<p><b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b></p>	<p>Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota</p>	<p>77.37 %</p>	<p>-</p>	<p>77.37 %</p>	<p>87,94 %</p>	<p>100</p>	<p>77.37 %</p>	<p>87,94 %</p>	<p>100</p>
<p>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</p>	<p>- Pengembangan Media Komunikasi Milik Daerah (RPD Kutim) - Penyebaran Informasi Publik Melalui RPD Kutim</p>	<p>5 Kecamatan, 365 siaran</p>	<p>1080 siaran</p>	<p>5 Kecamatan, 365 siaran</p>	<p>5 Kecamatan, 1080 siaran</p>	<p>100</p>	<p>5 Kecamatan, 365 siaran</p>	<p>5 Kecamatan, 1080 siaran</p>	<p>100</p>



## 2.6 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Kutai Timur

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik Publik;
3. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang penyelenggaraan e-Government;
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Persandian dan Statistik;

Dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur melaksanakan sebagai berikut :

### 1. Sekretariat menyelenggarakan 1 Program yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

### 2. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan Menyelenggarakan 1 Kegiatan

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



**3. Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian menyelenggarakan 1 Program**

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

**4. Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan 1 Kegiatan**

Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**5. Bidang Statistik Menyelenggarakan 1 Program**

Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur diukur berdasarkan indikator kinerja pelayanan. Hal ini mengacu pada hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sebelumnya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, dan juga ditinjau dari pendanaan.

**Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian:**

- a. Pembangunan infrastruktur jaringan TIK dalam rangka memfasilitasi keterhubungan (Interkoneksi) antar OPD untuk mengintegrasikan sistem informasi dan data base, layanan publik berbasis TIK. Dengan tersedianya Jaringan TIK ini akan mendukung implementasi SMART CITY, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan e-Government di lingkup Pemerintahan Daerah Kab. Kutai Timur. Dengan terbangunnya infrastruktur TIK tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah Kutai Timur. Jaringan Fiber Optik telah dibangun menghubungkan 13 OPD yaitu : Badan Pendapatan Daerah, Bappeda, BPKAD, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pendidikan, Diskominfo Staper dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, BKPP, DPMPTSP dan Dinas Kesehatan.
- b. Penyediaan jaringan internet Desa (VSAT) untuk 3 desa yang berada di Kec. Sandaran, Kec. Busang dan Kec. Batu Ampar. Dengan tersedianya akses internet desa ini diharapkan akan membantu pelayanan Jaringan TIK untuk penggunaan Sistem Informasi Desa.



- c. Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Membangun 2 Menara Telekomunikasi di Kecamatan Batu Ampar dan Busang, namun yang terbangun sampai 100% hanya yang di Kec. Batu Ampar sedangkan yang di Kec. Busang baru sampai tahap pengerjaan pondasi.
- d. Penyediaan layanan akses internet kesetiap organisasi perangkat daerah dalam kabupaten Kutai Timur yang berada di Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Timur Bukit Pelangi belum terlayani seluruhnya, karena terbatasnya ketersediaan kapasitas bandwidth yang dikelola oleh Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik. Sebagian OPD juga menganggarkan sendiri kebutuhan internetnya masing-masing.
- e. Pembentukan 3 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) . Dengan adanya KIM ini diharapkan akan menjadi media penyampaian Informasi dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat yang sifatnya G to C (Government to Citizen). sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Disamping itu persoalan yang ada di Masyarakat dapat ditangkap langsung oleh pemerintah dan selanjutnya dengan cepat dicarikan solusi dari persoalan tersebut.
- f. Terbentuk 1 PPID Utama dan 39 PPID Pembantu, yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkup Kabupaten Kutai Timur dan 18 PPID Pembantu di Kecamatan, sehingga secara keseluruhan terbentuk 57 PPID pembantu. Pelayanan informasi dilakukan secara manual melalui desk layanan dan secara online melalui website [www.ppido.kutaitimurkab.go.id](http://www.ppido.kutaitimurkab.go.id). Disamping itu penyebarluasan informasi publik melalui media sosial facebook dan instagram.
- g. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyediakan sistem informasi terintegrasi yang menyediakan data-data statistik sektoral dari setiap OPD. Data-data ini dapat diakses dalam portal satu data melalui situs [www.data.kutaitimurkab.go.id](http://www.data.kutaitimurkab.go.id).
- h. Dalam rangka Penyelenggaraan urusan persandian telah diterbitkan peraturan Bupati tentang penerapan tanda tangan elektronik dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Peraturan Bupati pelaksanaan persandian di Lingkup Kabupaten Kutai Timur.

Dari Tabel Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:



Pencapaian Kinerja sudah sesuai target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan yaitu:

- Seiring dengan perkembangan organisasi dan kebijakan pemerintah daerah terutama berkaitan dengan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka ada beberapa kegiatan yang belum selaras dengan target dalam Rencana strategis tahun 2016 – 2021 dan Rencana kerja tahun 2023.
- Jaringan TIK belum terkoneksi ke semua OPD sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan secara online belum dapat terintegrasi untuk mendukung penerapan SPBE dan Implementasi Smart City.
- Kapasitas koneksi internet yang dikelola Diskominfo belum memadai dan sebagian masih dianggarkan OPD masing, sehingga jaringan Fiber Optik yang telah terhubung ke 13 OPD belum maksimal pemanfaatannya.
- Penyelenggaraan urusan persandian dan pengamanan informasi masih belum berjalan dengan baik.
- Kinerja PPID OPD belum optimal mendukung Keterbukaan informasi publik.
- Masih terdapat area yang belum terjangkau layanan telekomunikasi.

### **2.7 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Kutai Timur**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

Sasaran	Permasalahan/ Isu Strategis
<b>Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi;</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada erea yang belum terjangkau layanan telekomunikasi sehingga akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi belum merata;</li> <li>- Pemanfaatan infrastruktur teknologi dalam mendukung peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>- Jaringan Internet belum terkoneksi ke semua OPD.</li> </ul>
<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pendukung pemanfaatan TIK;</li> <li>- Penerapan e-Government dan SPBE belum optimal;</li> <li>- Peningkatan peran PPID untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan</li> <li>- SDM yang berkompeten dibidang TIK masih kurang.</li> <li>- Tata kelola Statistik sectoral</li> <li>- Optimalisasi Media Informasi Pemerintah Daerah</li> </ul>
<b>Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan Data Center</li> <li>- Implementasi Smart City</li> <li>- Layanan internet belum terpusat di</li> </ul>



	<p>Dinas Kominfo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas layanan public berbasis TI</li> <li>- Keamanan Informasi</li> <li>- Literasi Digital</li> <li>- Jaringan Komunikasi intra Pemerintah Daerah</li> <li>- Sistem penghubung layanan pemerintah</li> </ul>
--	---

### 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Timur yang mengurus urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Program-Program Pembangunan ini harus dilaksanakan secara konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan program-program ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan serta mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah. Sehingga dalam penyusunan Renja tahun 2025 perlu memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan tahun 2024.

Tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur harus selaras dengan tema pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Mengacu pada kedua tema pembangunan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan tema pembangunan tahun 2025 sebagai berikut:



*“Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”*

Delapan point prioritas pembangunan yang disepakati dengan Musrebang adalah,

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya.
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan.
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

### **2.9 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat**

Untuk melaksanakan misi Good Governance, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan atau kebijakan publik yang dikenal dengan pengambilan kebijakan bottomup usulan langsung dari masyarakat kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat perlu diakomodir melalui sarana Musrenbangcam dan berkaitan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ada terdapat usulan Program Kegiatan Masyarakat yang telah terinput di SIPD.



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK**  
**DAN PERSANDIAN KAB. KUTAI TIMUR**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian perlu mereview perencanaan ditingkat pusat dan Provinsi Kalimantan Timur agar terjalin harmonisasi dan sinkronisasi proses pembangunan.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>Nasional</b>		
1	Penyediaan informasi publik pemerintah daerah	Permendagri 32/2017 tentang penyusunan RKPD Tahun 2018	
2	Penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah	Permendagri 32/2017 tentang penyusunan RKPD Tahun 2018	
3	Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah	Permendagri 32/2017 tentang penyusunan RKPD Tahun 2018	
4	Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah	Permendagri 32/2017 tentang penyusunan RKPD Tahun 2018	
5	Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Permendagri 32/2017 tentang penyusunan RKPD Tahun 2018	
6	Peningkatan kualitas layanan public pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)-egovernment	Permendagri 32/2017 tentang penyusunan RKPD Tahun 2018	



No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>B</b>	<b>Provinsi</b>		
1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan	Renstra Diskominfo Prov.Kaltim 2013-2018	
2	Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan di Kalimantan Timur	Renstra Diskominfo Prov.Kaltim 2013-2018	
3	Pengembangan sistem penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Renstra Diskominfo Prov.Kaltim 2013-2018	
4	Evaluasi terhadap kepuasan publik terhadap penyebaran informasi pembangunan di Kalimantan Timur	Renstra Diskominfo Prov.Kaltim 2013-2018	
5	Mebangun infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang akses informasi masyarakat secara Luas dengan menghilangkan daerah blankspot	Renstra Diskominfo Prov.Kaltim 2013-2018	

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan telaahan terhadap arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang telah dituangkan dalam RPJMD kabupaten Kutai Timur 2021 – 2026, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, untuk mewujudkan visi Pemerintahan Daerah Kutai Timur yaitu: “Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”. Dengan misi sebagai berikut:



1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan Bersatu
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Review rencana kerja ini disusun dengan tujuan Terciptanya pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan. Sehingga dalam penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsinya akan mewujudkan suatu sistem yang terpadu dan saling mendukung dengan sektor lainnya.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur yaitu:

### **Tujuan**

- Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.
- Terwujudnya informasi dan komunikasi publik yang berkualitas.
- Tersedianya data sektoral Kabupaten Kutai Timur.
- Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur SPBE, pengembangan Sumberdaya SPBE, dan optimalisasi Tata Kelola SPBE menuju Kutai Timur Smart City.

### **Sasaran**

- Meningkatkan Pelayanan dan Dukungan Sarana Prasarana Penunjang Pemerintah Daerah
- Mewujudkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah yang berkualitas, akuntabel
- Meningkatnya keterisian data sektoral yang menggambarkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
- Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur SPBE, pengembangan Sumberdaya SPBE, dan optimalisasi Tata Kelola SPBE menuju Kutai Timur Smart City.
- Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi



No.	Tujuan	Sasaran	Sasaran Indikator
1	Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap	Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Cakupan Layanan Telekomunikasi
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik	Tersedianya system data dan statistic yang terintegrasi Persentase OPD yang terkoneksi jaringan Fiber Optik Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase OPD yang menyampaikan Informasi Publik Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik Jumlah Sistem Informasi/ Aplikasi yang terintegrasi Jumlah Perangkat daerah Yang terkoneksi jaringan Fiber Optik Jumlah layanan public yang diselenggarakan Persentase OPD yang Persentase Tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi dari masyarakat dalam



			Jumlah Penyebaran Informasi melalui media (eletronik, cetak dan online)
			Persentase OPD yang menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi
			Jumlah Layanan pengamanan informasi dilingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur
			Persentase OPD yang menyediakan data statistik sektoral
			Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan Dinas Kominfoperstik
			Persentase Aparatur yang mengikuti bimtek/ diklat

### 3.3. PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN

Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah disusun berdimensi tahunan. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja 5 (lima) tahunan.

Kegiatan-kegiatan kelembagaan disusun berdasarkan masukan-masukan PD lain, Aparatur Kecamatan, dan penyampaian aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran anggota DPR. Beberapa bahan masukan tersebut diperoleh pada saat kegiatan Musyawarah



Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten kutai Timur dan melalui usulan yang disampaikan dalam SIPD.

Pada Dokumen Renja Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Menyelenggarakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri atas 8 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan
2. Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian Menyelenggarakan Program aplikasi informatika yang terdiri atas 4 Kegiatan dan 11 Sub kegiatan.
3. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan Menyelenggarakan Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 1 Kegiatan dan 10 Sub kegiatan.
4. Bidang Aplikasi Informatika Menyelenggarakan 1 Program, 2 Kegiatan, dan 4 Sub kegiatan.
5. Bidang Statistik Menyelenggarakan 1 Program,1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

Rincian Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rincian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			-Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		



		-Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		-Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		-Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5. Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,	-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD -Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		8. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		2. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah -Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas - Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah -Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah -Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah -Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) -Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE



			- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
3	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</li> <li>-Pengelolaan Media Komunikasi Publik</li> <li>-Pelayanan Informasi Publik</li> <li>- Layanan Hubungan Media</li> <li>-Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</li> <li>- Manajemen Komunikasi Krisis</li> <li>-Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</li> <li>- Penguatan Tata Kelola Komisi Infrmasi di Daerah</li> <li>-Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</li> <li>- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
4	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</li> <li>Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</li> <li>Membangun Metadata Statistik Sektoral</li> <li>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</li> <li>Pengembangan Infrastruktur</li> </ul>



			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
5	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik ( UPT Radio RPD )</b>	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik



Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatatif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Kutai Timur Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Outcome	Output	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuh an Dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuh an Dana/ Pagu Indikatif
x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan				100%			100%	

**BAB IV**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja PD				PAD			
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 DOKUMEN	1.050.668.000	PAD		2 DOKUMEN	500.000.000
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	299.701.000	PAD		1 dokumen	350.000.000
2.16.01.2.010011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Dalam dan Luar Daerah	7 Dokumen 2 Laporan	199.004.000	PAD	-	-	-

**BAB IV**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Kab.Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			PAD			
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	16.222.009.076	PAD		70 Orang	1.585.000.000
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Kab.Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	720.582.020	PAD		2 dokumen	200.000.000

**BAB IV**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				70 %				100 %	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapan yang disediakan	Sangatta Kab. Kutai Timur	465 Stel Pakaian Kerja	200.000.000	PAD		1 Pakaet	250.000.000
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Timur	20 orang Fugsional tertentu / Fugsional umum	400.000.000	PAD		20 orang Fugsional tertentu / Fugsional umum	550.000.000
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Terlaksananya administrasi penunjang pelaksanaan urusan				PAD			

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



			perangkat daerah							
2.16.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Terpenuhi ya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Dalam Daerah Kab. Kutai Timur	Terpenuhi ATK 35 jenis, 2 set meja kursi Pejabat Ess II & III, 1 set Rak Besi/Meta 1 barang, 20 Kursi Kerja, dan peralatan kantor lainnya	947.296.224	PAD		Terpenuhi ATK 35 jenis, 5 unit Komputer, 1 set Meja kursi Rapat Besar, dan peralatan kantor lainnya	250.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Terpenuhi ya Peralatan Rumah Tangga yang memadai	Kantor Dinas Komunika si dan Informatik a Persandia n dan Statistik	Terpenuhi 20 jenis/item Peralatan dan bahan Kebersiha n, Kulkas Mini, 1 set peralatan dapur, Penyempr ot Tangan (Hand Sraye), 1 set peralatan taman, Televisi, Troli Cleaning Service	116.032.562	PAD	Terpenu hi 20 jenis/ite m Peralata n dan bahan Kebersi han, Kompore, Tekolist rik, Mesin Potong Rumput, Tool Kit Boks, Tempat sampah besar, Alat Pemada m Api, Vacuum cleaner	150.000.000
-----------------	-----------------------------------	--	---	---	--	-------------	-----	---	-------------

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo SP	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	207.082.416	PAD		1 Paket	400.000.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya 50 kali kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.199.906.080	PAD		Terlaksananya 50 kali kegiatan Rakor Koordinasi dan Konsultasi	550.000.000
2.16.01.2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Timur	1 Dokumen	30.000.000	PAD		1 Dokumen	50.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						PAD		
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik	5 Unit	2.194.800.000	PAD		5 Unit	1.800.000.000
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersediannya Pengadaan Mebel yang tersedia	Kantor DISKOMINFO SP	1 paket	235.000.000	PAD		1 Paket	1.000.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Kutai Timur	0 Unit	500.000	PAD		Unit	150.000.000
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Tersedianya jasa penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				PAD			
2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Terpenuhiya/ tercukupinya kebutuhan akan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian dan Statistik	Terpenuhi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	51.000.000	PAD		Terpenuhi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	600.000.000

**BAB IV**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>						PAD			
2.16.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	11 Unit	159.940.000	PAD		11 Unit	400.000.000
2.16.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,	40 Unit	150.000.000	PAD		40 Unit	250.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



				Sangatta Utara						
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian dan Statistik	semenisasi halaman 120 m2, Pemeliharaan taman dan gedung kantor 1 tahun, terlaksananya perencanaan pembangunan gedung/bangunan kantor	250.000.000	PAD		Pembangunan/ Renovasi gedung kantor, Pemeliharaan taman dan gedung kantor 1 tahun	550.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				83.17 %		PAD		85.48 %	
2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kutai Timur							
2.16.02.2.01.14	Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	57.720	PAD		1 Laporan	500.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



			berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media							
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dalam dan Luar Daerah	-	200.000.000	PAD		-	-
2.16.02.2.01.16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam		Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata	Dalam dan Luar Daerah	-	53.280	PAD		-	200.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



	Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik							
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.019.898.350	PAD		1 Dokumen	2.500.000.000
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	700.000.000	PAD		1 Dokumen	1.000.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



2.16.02.2.01.20	Diseminasi Informasi		Tersediannya Diseminasi Informasi di Kabupaten Kutai Tmur	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	1.198.037.237	PAD		-	-
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dalam dan Luar Daerah	5 Dokumen	14.000.000.000	PAD		2 Dokumen	3.000.000.000
2.16.02.2.01.22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Dalam dan Luar Daerah	1Dokumen	380.048.370	PAD		2 Dokumen	300.000.000
2.16.02.2.01.23	Penyusunan Konten		Jumlah Penyusunan Konten	Dalam dan Luar Daerah	365 Konten	1.000.000.000	PAD		365 Konten	550.000.000

**BAB IV**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>				62,86%		APBD		77,41%	
2.16.03.2.02	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Terlaksananya pengelolaan nama domain dan sistem jaringan dilingkungan Pemerintah Daerah Kutai Timur				APBD			
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan	1 Dokumen	10.637.724.000	PAD		1 Dokumen	4.000.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



			Pusat Data Nasional	n, Semua Kel/Desa						
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Aplikasi	5.736.983.938	PAD		3 Aplikasi	1.700.000.000
2.16.03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan	15 Unit	1.399.041.280	PAD		5 Unit	700.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



			Kota Cerdas	n, Semua Kel/Desa						
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 PD	7.968.963.109	PAD		38 PD	2.000.000.000
2.16.03.2.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan		Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Program	917.185.420	PAD		6 Program	250.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



	Kabupaten atau Kota Cerdas		Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas							
2.16.03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640 Perangkat Daerah	25.798.330.000	PAD		1 Dokumen	6.000.000.000
2.16.03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640 Perangkat Daerah	25.798.330.000	PAD		1 Dokumen	6.000.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



2.20.02	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>									
2.20.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>									
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Kutai Timur	10 Orang	600.000.000	PAD		10 Orang	600.000.000
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	100 Persentase	300.000.000	PAD		100 Persentase	400.000.000

**BAB IV**  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



			Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kel/Desa Daerah						
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Dalam dan Luar Daerah	20 Persentase	300.000.000	PAD		20 Persentase	300.000.000
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	300.000.000	PAD		5 Dokumen	300.000.000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**



<p><b>2.21.02</b></p>	<p><b>PROGRAM  PENYELENGGARAAN  PERSANDIAN UNTUK  PENGAMANAN  INFORMASI</b></p>	<p>Perse  ntase  OPD  yang  meng  gunak  an  siste  m  jaring  an  komu  nikasi  sandi</p>								
<p><b>2.21.02.2.01</b></p>	<p><b>Penyelenggara  an Persandian  untuk  Pengamanan  Informasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Ko  ta</b></p>		<p>Terselengga  ranya  Persandian  untuk  pengamana  n informasi  dilingkup  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Timur</p>		<p>45%</p>		<p>APBD</p>		<p>60%</p>	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**



2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	386.036.000	APBD		1 Laporan	250.000.000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	213.918.000	PAD		1 layanan	650.000.000

BAB IV  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



			Elektronik dan Non Elektronik							
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Dalam dan Luar Daerah	38 Perangkat Daerah	200.107.000	PAD		38 Perangkat Daerah	250.000.000
2.21.02.2.02	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Terbentuknya Pola Jaringan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah				PAD			

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**



2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Dalam dan Luar Daerah	6 OPD dan 6 org	49.944.000	PAD		6 OPD dan 6 org	50.000.000
<b>Jumlah</b>						<b>102.101.849.082</b>				<b>35.435.000.000</b>



## BAB V PENUTUP

Ranwal Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 sesuai dengan fungsinya merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan yang memuat Prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif, dengan adanya Dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 diharapkan :

1. Seluruh pelaku Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur, hendaknya berupaya semaksimal mungkin melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi serta integrasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD maupun APBN, maka setiap Bidang harus menyusun dan membuat Renja masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2025.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025 sesuai dengan Tupoksi masing-masing

### 4.1 Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, maupun untuk keterpaduan, sinkonisasi dan harmonisasi perencanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan dalam APBD tersebut, karena itu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang memuat



memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra yang mengacu pada penjelasan terhadap visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan tahun 2021 – 2026, dimana renstra tersebut yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur.

2. Seluruh bidang yang ada dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja yang telah disusun berdasarkan Renstra dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab serta akuntabel.
3. Renja ini pula sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 sehingga merupakan suatu dokumen yang formal untuk menyusunnya secara berjenjang.

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini yang telah disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal yakni peluang dan tantangan, dengan pendekatan tersebut diharapkan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur sebagai lembaga dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sangatta, Maret 2024

Plt. Kepala Dinas  
**Sulisman S.Sos., MM**  
NIP. 19780915 200302 1 002

